

Matriks Capaian RAN OGI B06 LKPP 2023-2024

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
1	Publikasi transaksi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog	Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi	<p>- Telah dilakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia dan Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik pada tanggal 25-27 Mei 2023. Agenda pembahasannya adalah membahas kebutuhan pengelola katalog elektronik terkait ketersediaan dashboard monev pada katalog elektronik.</p> <p>- Hasil Rapat tersebut antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan untuk dashboard yang dapat menampilkan terkait dengan perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk tayang berdasarkan jenis produknya, detail dari transaksi E-purchasing yang dilakukan oleh PPK/PP pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2) Kebutuhan dashboard ini juga diharapkan bisa disajikan secara real-time dan memiliki tampilan dashboard yang mudah dipahami oleh para pengguna, mengingat kebutuhan dashboard ini selain untuk kegiatan monitoring-evaluasi produk dan transaksi juga dibutuhkan oleh para pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. 3) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki kebutuhan untuk dapat mengunduh detail transaksi E-purchasing dari dashboard monev tersebut.
2	Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan OMS	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Hingga saat ini, informasi pengadaan darurat yang telah tersedia dan dapat dilihat pada SPSE meliputi hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai paket, 2) nilai kontrak (realisasi), 3) nilai PDN, 4) nilai UMK, 5) tanggal paket selesai, dan 6) nama penyedia

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
3	Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan bulan Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dengan sistem e-pengaduan - Menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan yang belum dapat digunakan, saat ini pada laman e-pengaduan telah diinformasikan mengenai alternatif penyampaian pengaduan melalui surat yang disertai dengan user guide persuratan e-office LKPP dan format surat pengaduan. Pengaduan yang disampaikan melalui surat selama aplikasi e-pengaduan belum dapat digunakan adalah sebanyak 84 pengaduan - Akan diadakan rapat antara Pusat Data dan Informasi LKPP, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan.
4	Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2. Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama - Hasil dari rapat tersebut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	
		B06 (2023)	Progres/Capaian B06
5	Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS	<p>- Terkait informasi yang telah dibuka dan berada di bawah kewenangan LKPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja Perencanaan PBJ melalui RUP SIRUP termasuk dashboard Profil RUP selalu terupdate secara berkala dan dapat diakses oleh publik 2) Profil Kinerja PBJ dapat diakses publik melalui tautan https://pmep.lkpp.go.id dan Laporan Pengadaan K/L dan Pemda selalu terupdate setiap minggu 3) Profil Kinerja PDN dapat diakses publik melalui tautan https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 4) Dashboard ITKP K/L dan Pemda dapat diakses melalui https://sirup.lkpp.go.id dan https://pmep.lkpp.go.id 5) Dashboard Kinerja PBJ juga dapat dimonitoring melalui AMEL yang langsung terinstall pada masing-masing LPSE <p>- Hal tersebut telah disampaikan pada rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023.</p>
		2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Terkait mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang Terkait dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi: Analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan</p>
6	Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	<p>- Telah dilaksanakan rapat Ko-kreasi dengan agenda pembahasan terkait capaian target B06 untuk ukuran keberhasilan ke-6 pada tanggal 26 Juni 2023 yang dihadiri oleh perwakilan LKPP, perwakilan ICW dan TII sebagai unsur OMS.</p> <p>- Akan dilaksanakan Ko-kreasi antara LKPP dengan ICW dan TII dalam peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa</p>

Matriks Capaian RAN OGI B06 LKPP 2023-2024

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
1	Publikasi transaksi Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog	Dilaksanakannya rapat yang membahas komponen informasi transaksi e-katalog yang akan dipublikasi	<p>- Telah dilakukan pertemuan dengan PT Telkom Indonesia dan Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik pada tanggal 25-27 Mei 2023. Agenda pembahasannya adalah membahas kebutuhan pengelola katalog elektronik terkait ketersediaan dashboard monev pada katalog elektronik.</p> <p>- Hasil Rapat tersebut antara lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan untuk dashboard yang dapat menampilkan terkait dengan perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk tayang berdasarkan jenis produknya, detail dari transaksi E-purchasing yang dilakukan oleh PPK/PP pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2) Kebutuhan dashboard ini juga diharapkan bisa disajikan secara real-time dan memiliki tampilan dashboard yang mudah dipahami oleh para pengguna, mengingat kebutuhan dashboard ini selain untuk kegiatan monitoring-evaluasi produk dan transaksi juga dibutuhkan oleh para pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan. 3) Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki kebutuhan untuk dapat mengunduh detail transaksi E-purchasing dari dashboard monev tersebut.
2	Publikasi secara rinci informasi pengadaan darurat	Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE dengan melibatkan OMS	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Hingga saat ini, informasi pengadaan darurat yang telah tersedia dan dapat dilihat pada SPSE meliputi hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nilai paket, 2) nilai kontrak (realisasi), 3) nilai PDN, 4) nilai UMK, 5) tanggal paket selesai, dan 6) nama penyedia

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	Progres/Capaian B06
		B06 (2023)	
3	Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan dalam menangani pengaduan masyarakat	Persiapan integrasi inspektorat K/L/PD di dalam sistem e-pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan bulan Mei 2023, terdapat 83 Inspektorat K/L/PD yang telah bergabung dengan sistem e-pengaduan - Menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan yang belum dapat digunakan, saat ini pada laman e-pengaduan telah diinformasikan mengenai alternatif penyampaian pengaduan melalui surat yang disertai dengan user guide persuratan e-office LKPP dan format surat pengaduan. Pengaduan yang disampaikan melalui surat selama aplikasi e-pengaduan belum dapat digunakan adalah sebanyak 84 pengaduan - Akan diadakan rapat antara Pusat Data dan Informasi LKPP, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menindaklanjuti kendala pada sistem e-pengaduan.
4	Pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka	Pembahasan terkait data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKAP dengan melibatkan OMS	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2. Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama - Hasil dari rapat tersebut: <ul style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 3) Untuk integrasi antara SIKaP dengan Beneficial Ownership saat ini telah selesai dengan menampilkan data dari AHU

No.	Ukuran Keberhasilan	Renaksi	
		B06 (2023)	Progres/Capaian B06
5	Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai dengan kewenangan LKPP	1. Pembahasan terkait informasi yang wajib dibuka sesuai Perki No. 1 Tahun 2021 yang berada di bawah kewenangan LKPP dengan melibatkan OMS	<p>- Terkait informasi yang telah dibuka dan berada di bawah kewenangan LKPP, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kinerja Perencanaan PBJ melalui RUP SIRUP termasuk dashboard Profil RUP selalu terupdate secara berkala dan dapat diakses oleh publik 2) Profil Kinerja PBJ dapat diakses publik melalui tautan https://pmep.lkpp.go.id dan Laporan Pengadaan K/L dan Pemda selalu terupdate setiap minggu 3) Profil Kinerja PDN dapat diakses publik melalui tautan https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 4) Dashboard ITKP K/L dan Pemda dapat diakses melalui https://sirup.lkpp.go.id dan https://pmep.lkpp.go.id 5) Dashboard Kinerja PBJ juga dapat dimonitoring melalui AMEL yang langsung terinstall pada masing-masing LPSE <p>- Hal tersebut telah disampaikan pada rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023.</p>
		2. Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama	<p>- Telah dilakukan rapat Ko-kreasi RAN OGI 2023-2024 antara LKPP yang terdiri dari perwakilan Direktorat Sistem Pengadaan Digital, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan mengundang ICW sebagai OMS pada tanggal 7 Juni 2023, dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembahasan terkait komponen informasi pengadaan darurat yang akan ditambahkan dalam dashboard LPSE 2) Pembahasan terkait dengan data kinerja penyedia yang akan dipublikasi di SIKaP 3) Pembahasan mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu objek program yang sama <p>- Hasil dari rapat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Sistem Pengadaan Digital dalam mengembangkan aplikasi menyesuaikan dengan kebijakan yang ada. Saat ini ICW sedang menyusun kajian terkait dengan masukan dalam pengembangan aplikasi SPSE darurat, SIKaP, dan Mekanisme/bentuk kode unik untuk menyatukan pekerjaan yang terkait pada SPSE. 2) Apabila kajian tertulis tersebut telah selesai, akan dijadikan bahan masukan untuk D22 dalam pengembangan aplikasi tersebut. 4) Untuk publikasi informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun memang tidak seluruh data dapat disediakan oleh LKPP. Terdapat beberapa dokumen yang memang dimiliki oleh masing masing UKPBJ K/L/Pemda <p>- Terkait mekanisme/bentuk kode unik yang menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang Terkait dalam satu objek program yang sama, kegiatan yang telah dilakukan oleh LKPP meliputi: Analisa belanja pemerintah dengan menggunakan kode unik berdasarkan kinerja realisasi PBJ K/L dan Pemda bukan kinerja perencanaan. kode unik sedang tahap pengembangan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital dan Direktorat Pasar Digital Pengadaan</p>
6	Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembahasan MOU antara LKPP dengan OMS	<p>- Telah dilaksanakan rapat Ko-kreasi dengan agenda pembahasan terkait capaian target B06 untuk ukuran keberhasilan ke-6 pada tanggal 26 Juni 2023 yang dihadiri oleh perwakilan LKPP, perwakilan ICW dan TII sebagai unsur OMS.</p> <p>- Akan dilaksanakan Ko-kreasi antara LKPP dengan ICW dan TII dalam peningkatan kompetensi kepada masyarakat tentang pengawasan Pengadaan Barang/Jasa</p>

Nomor : 12766/D.2.3/05/2023 22 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik

Yth. **PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**
di Tempat

Dalam rangka memastikan seluruh fungsi dari fitur *dashboard* monev Katalog Elektronik yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik serta seluruh *knowledge* terkait pengembangan aplikasi dapat terdokumentasi dan dipahami dengan baik oleh para pengguna, maka diperlukan Kegiatan Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis - Sabtu, 25 - 27 Mei 2023
Waktu : Jadwal Terlampir
Tempat : Ruang Rapat Ibis Trans Studio Hotel Bandung
Agenda : Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan agar Bapak/Ibu dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Zi5haR
Nomor Tiket : SK202305220002

Peserta Undangan

1. Erlangga Aninditya - Analis Kebijakan Madya Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
2. Ari Sulindra - Analis Kebijakan Madya Direktorat Pasar Digital Pengadaan
3. Devi Yanurida - Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan
4. Febrita Sidabalok - Analis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
5. Imam Arumsyah - Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan
6. Andri Priyo Utomo - Pranata Komputer Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan
7. Hilman Fazri - Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan
8. Sri Utaminingsih - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
9. Muhammad Arief Setiawan - Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Pasar Digital Pengadaan
10. Ervina Utami BR. Panjaitan - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
11. Candra Simon Septyan - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
12. Alodia Calista Adha - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
13. Akhmad Ilman Madani - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
14. Elvi Egyasti - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
15. L. Rani Esi Hapsari - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
16. Rizki Veronika Damayanti Situmorang - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
17. Mega Chandra Sera - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
18. Moses Alfredo Samodara - Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Direktorat Pasar Digital Pengadaan
19. Muhammad Fakhri Naufaldi - Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
20. Anindita Widya Sismiati - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
21. Rr. Ajeng Kusharyeni Pratiwi - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
22. Desi Kartika - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
23. Meleis Susanti - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
24. Hilma Oktaviani - Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pasar Digital Pengadaan
25. Ayu Rosalina Wibowo - Analis Data dan Informasi Direktorat Pasar Digital Pengadaan
26. Made Widhiantika - Perencana Pertama Direktorat Pasar Digital Pengadaan
27. Mela Ervina Rahmat - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Pasar Digital Pengadaan)
28. Riski Wicaksono - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Pasar Digital Pengadaan)
29. Tiya Utami - Penyedia Jasa Lainnya - Sekretaris(Direktorat Pasar Digital Pengadaan)
30. Yuli Andika Triardianto - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Pasar Digital Pengadaan)



31. Indra Wulida Ramdan - Penyedia Jasa Lainnya(Direktorat Pasar Digital Pengadaan)



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : Zi5haR
Nomor Tiket : SK202305220002

Nomor : 12765/D.2.3/05/2023 22 Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik

Yth. **Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat**
di Tempat

Dalam rangka memastikan seluruh fungsi dari fitur *dashboard* monev Katalog Elektronik yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik serta seluruh *knowledge* terkait pengembangan aplikasi dapat terdokumentasi dan dipahami dengan baik oleh para pengguna, maka diperlukan Kegiatan Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis - Sabtu, 25 - 27 Mei 2023
Waktu : Jadwal Terlampir
Tempat : Ruang Rapat Ibis Trans Studio Hotel Bandung
Agenda : Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan agar Bapak/Ibu dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :
Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 2hgBW3
Nomor Tiket : SK202305220002

LAPORAN KEGIATAN
RAPAT PENGEMBANGAN *DASHBOARD* MONEV DALAM RANGKA PEMANTAUAN PRODUK DAN TRANSAKSI
KATALOG ELEKTRONIK

- A. WAKTU PELAKSANAAN** : Kamis - Sabtu, 25 Mei – 27 Mei 2023
Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
- B. TEMPAT** : Ibis Trans Studio Hotel Bandung
- C. PESERTA** :
1. Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP RI;
 2. Analis Kebijakan Madya Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP RI;
 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda Biro PBJ Sekda Provinsi Jawa Barat
 4. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Sekda Provinsi Jawa Barat
 5. Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi Biro PBJ Sekda Provinsi Jawa Barat
 6. PT. Telkom Indonesia
 7. Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan
 8. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama Biro Humas dan Umum
 9. Anggota Tim Pengelolaan Kebijakan Katalog Elektronik Nasional Direktorat Pasar Digital Pengadaan
 10. Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Direktorat Pasar Digital Pengadaan
 11. Anggota Tim Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal/Sektoral Direktorat Pasar Digital Pengadaan
 12. Anggota Tim Pengelolaan Sistem Informasi Katalog Elektronik Direktorat Pasar Digital Pengadaan
 13. Staf Direktorat Pasar Digital Pengadaan

D. DASAR

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
7. Surat edaran Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik Pasca Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik; dan
8. Nota Dinas Nomor: 12064/D.2.3/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik di Luar Kantor Tanggal 25-27 Mei 2023
9. Surat Tugas Direktur Pasar Digital Pengadaan Nomor: 13147/D.2.3/05/2023 tanggal 24 Mei 2023.

E. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan Nota Dinas Nomor: 12064/D.2.3/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Rapat Pengembangan *Dashboard* Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk dan Transaksi Katalog Elektronik di Luar Kantor Tanggal 25-27 Mei 2023 di Ibis Trans Studio Hotel Bandung. Agenda kegiatan yang di diskusikan adalah pembahasan *dashboard* monev dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pengembangan fitur *dashboard* monev terbaru,

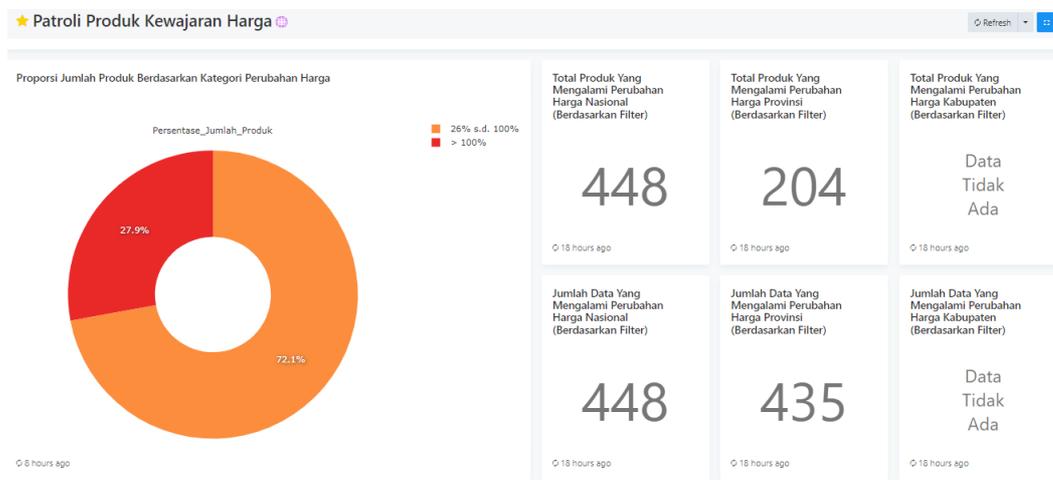
penyampaian tanggapan dan masukan terhadap hasil pengembangan fitur *dashboard* monev terbaru dan evaluasi rapat pengembangan *dashboard* monev dalam rangka pemantauan produk dan transaksi katalog elektronik.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan di buka oleh Devi Yanurida selaku Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan dengan memberikan latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini yaitu terkait pengembangan *dashboard* monev dalam rangka pemantauan produk dan transaksi katalog elektronik. Kegiatan kali ini mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan sosialisasi dan juga menginformasikan rencana kedepan untuk melakukan sosialisasi ke KLPD lainnya agar proses monev katalog elektronik juga di laksanakan oleh pengelola katalog elektronik masing-masing instansi pemerintah. Devi menambahkan bahwa pada Kepka LKPP Nomor 122 tahun 2022 dan SE Kepala LKPP tahun 2022 sudah menjelaskan tanggung jawab pengelola katalog elektronik dan pelaksanaan monev katalog elektronik. Sebelum adanya fitur *dashboard* monev, pelaksanaan monev katalog elektronik dilakukan secara manual. Di LKPP pelaksanaan monev katalog elektronik sudah dilakukan dengan mengusulkan hasil patroli kepada pimpinan berupa laporan monev. Diharapkan setelah sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pengelola katalog elektronik sudah bisa menjalankan tugas patroli katalog elektronik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini tim UKPBJ Jawa Barat memberikan harapan agar sistem untuk pengadaan konstruksi di katalog elektronik bisa lebih di siapkan, begitu pula dengan kewajaran harga dan keabsahan produk tayang karena sudah tidak ada lagi proses verifikasi. Saat ini tampilan *dashboard* monev yang sudah ada bisa menjawab sekitar 30% dari kebutuhan data pimpinan Provinsi Jawa Barat, sehingga harapan dari pengelola katalog elektronik Provinsi Jawa Barat agar semakin banyak data yang bisa di ditampilkan di *dashboard* monev katalog elektronik.

Selanjutnya tim Telkom mempraktikan fitur *redash* katalog elektronik yang diakses melalui link : <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/> salah satunya adalah fitur patroli produk kewajaran harga dengan gambaran *dashboard* seperti pada gambar di bawah ini.



Fitur patroli ini memiliki filter yaitu, filter tanggal dan kategori presentase perubahan harga. Perbandingan harga yang muncul pada *dashboard* ini adalah harga produk per filter tanggal dan harga produk sebelum perubahan terakhir. Harga yang di ditampilkan juga sudah menunjukkan data harga nasional, provinsi dan kabupaten di etalase Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari UKPBJ Provinsi Jawa Barat bertanya terkait notifikasi penyedia yang terkena *freeze* produk akibat dari patroli katalog elektronik. tim Monev Direktorat Pasar Digital Pengadaan menjawab notifikasi saat terkena *freeze* produk belum ada, namun dapat di lihat pada informasi di riwayat produk dan di halaman daftar produk penyedia. Tim UKPBJ Provinsi Jawa Barat berharap bisa di buat notifikasi kepada penyedia yang terkena *freeze* produk seperti notifikasi yang ada di fitur laporan yang sudah berjalan.

Selanjutnya PT Telkom Indonesia memaparkan fitur patroli transaksi negosiasi yang arahnya ingin memeriksa produk yang sudah di negosiasi oleh pembeli sehingga kewajiban negosiasi yang sudah di implementasikan di sistem *e-purchasing* katalog elektronik dapat di pantu berapa persentase negosiasi yang terjadi. Filter pada fitur ini berupa filter tanggal, jumlah upaya negosiasi, nominal negosiasi, tahun anggaran dan persentase negosiasi.

Tim UKPBJ Provinsi Jawa Barat bertanya ketika sudah ditemukan ada kejanggalan, tindak lanjut apa yang bisa dilakukan oleh pengelola katalog elektronik. Tim Monev Direktorat Pasar Digital Pengadaan menjawab untuk pengelola dapat membuat surat peringatan kepada pembeli dan penyedia yang bersangkutan untuk kedepannya melakukan proses negosiasi saat ada paket pengadaan.

Selanjutnya di paparkan fitur validasi kesesuaian produk pada katalog dan TKDN. Tim Monev Direktorat Pasar Digital Pengadaan menginformasikan pada penamaan produk dan sertifikat TKDN antara P3DN dan LKPP tidak ada regulasi yang mengikat sehingga dapat terjadi perbedaan penulisan serta formatnya sehingga butuh adanya validasi oleh pengelola terkait hal ini. Tim UKPBJ Provinsi Jawa Barat bertanya untuk produk yang memiliki banyak komponen, apakah bisa di tampilkan juga sertifikat TKDN per komponennya dan juga berharap agar data bisa di download dan lengkap untuk pengelola yang memiliki akun monev katalog elektronik. Tim Monev Direktorat Pasar Digital Pengadaan menjawab kedepannya akan ada pengembangan sistem tersebut untuk memudahkan proses monev katalog elektronik. Tim Monev Direktorat Pasar Digital Pengadaan menjawab juga dikarenakan data monev ini dapat di akses publik sehingga tidak semua data dapat di tampilkan, jika memang ada kebutuhan data, pengelola Katalog Elektronik dapat bersurat ke Direktur Pasar Digital Pengadaan untuk dapat difasilitasi.

Terkait dengan upaya LKPP untuk mengembangkan Dashboard Monev Katalog Elektronik, Tim UKPBJ Provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi atau kebutuhan sebagai berikut:

1. Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kebutuhan untuk dashboard yang dapat menampilkan terkait dengan perkembangan penayangan produk, komposisi jumlah produk tayang berdasarkan jenis produknya, detail dari transaksi E-purchasing yang dilakukan oleh PPK/PP pada Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Kebutuhan dashboard ini juga diharapkan bisa disajikan secara real-time dan memiliki tampilan dashboard yang mudah dipahami oleh para pengguna, mengingat kebutuhan dashboard ini selain untuk kegiatan monitoring-evaluasi produk dan transaksi juga dibutuhkan oleh para pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan.
3. Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki kebutuhan untuk dapat mengunduh detail transaksi E-purchasing dari dashboard monev tersebut.

Pada hari kedua kegiatan Rapat Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk Dan Transaksi Katalog Elektronik dilakukan pembahasan terkait Ringkasan Atas Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi Katalog Elektronik Tahun 2022 yang di paparkan oleh oleh Devi Yanurida selaku Analis Kebijakan Muda Direktorat Pasar Digital Pengadaan dengan menjelaskan ruang lingkup pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Katalog Elektronik yang meliputi Dasar Pelaksaaan Monev Katalog Elektronik, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Produk Tayang dan Jumlah Penyedia pada Katalog Elektronik, Monitoring dan Evaluasi Atas Transaksi E-Purchasing Melalui Katalog Elektronik, Monitoring dan Evaluasi Atas Pencantuman Barang / Jasa dalam Katalog Elektronik Tahun 2021-2022, Penanganan Pengaduan Katalog Elektronik dan Pelaksanaan Kegiatan Patroli Katalog Elektronik.

Pada hari ketiga kegiatan Rapat Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk Dan Transaksi Katalog Elektronik, tim dari PT Telkom menjelaskan tindak lanjut yang dapat dilaksanakan berdasarkan masukan yang diberikan dari tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk menjelaskan rencana untuk mengembangkan beberapa fitur patroli lainnya yang masuk sebagai pengembangan tahap kedua. Fitur patroli yang akan masuk sebagai pengembangan tahap kedua antara fitur untuk membandingkan harga produk yang tayang di Katalog Elektronik dengan harga produk serupa atau memiliki spesifikasi yang tayang pada *platform e-marketplace* swasta serta fitur untuk melakukan pengecekan substitusi PDN untuk produk impor yang tayang pada Katalog Elektronik. Kemudian PT Telkom juga menyampaikan bahwa untuk Dashboard Monev Produk dan Transaksi sudah tersedia fitur untuk mengunduh laporan dari dashboard dalam bentuk excel dan fitur unduh ini tersedia untuk Pengelola Katalog Elektronik yang sudah diberikan akun untuk mengakses dashboard dari <https://redash-e-katalog.lkpp.go.id/>.

G. KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan Rapat Pengembangan Dashboard Monev Dalam Rangka Pemantauan Produk Dan Transaksi Katalog Elektronik LKPP sebagai pengelola Katalog Nasional melakukan sosialisasi Pengembangan Fitur Dashboard Patroli Katalog Elektronik untuk memvalidasi bahwa Fitur Dashboard yang dikembangkan oleh tim telkom telah sesuai dengan kebutuhan para pengelola katalog dengan berfokus pada Patroli Kesesuaian TKDN, Patroli Transaksi Negosiasi, Produk Kewajaran Harga. Dari Pengelola Katalog Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan pengelola katalog sudah merespon dengan baik Dashboard Patroli Katalog Elektronik ini dan memberikan masukan untuk dilakukan pengembangan fitur, dalam hal ini PT Telkom akan mengembangkan analisis data dan dibahas bersama tim LKPP sehingga Fitur Dashboard Patroli Katalog Elektronik siap untuk diluncurkan dan digunakan oleh para Pengelola Katalog Elektronik.

Terkait pengembangan Dashboard Monev Produk dan Transaksi, masukan yang diberikan oleh Tim UKPBJ Jawa Barat terkait berbagai kebutuhan dari Pengelola Katalog Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah dicatat oleh PT Telkom sebagai masukan atau *requirement* untuk pengembangan fitur dashboard monev tersebut.

H. DOKUMENTASI



Mengetahui,

Notulis,

Ari Sulindra

Analisis Kebijakan Madya
Direktorat Pasar Digital Pengadaan

Sri Utaminingsih

Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Direktorat Pasar Digital Pengadaan